

BAB IV

ANALISA DATA SEKUNDER DAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA BARAT

Analisa deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Sumatera Barat.

4.1. Karakteristik Penduduk

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Sumbar

(dalam ribuan)

Keterangan	Perkotaan	Perdesaan
Laki-laki	712	1.572
Perempuan	718	1.628
Total	1.430	3.201

Sumber: Susenas Modul 2006

Persentase penduduk perkotaan dijadikan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Semakin tinggi persentase penduduk perkotaan cenderung lebih maju daerahnya.

4.2. Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*)

Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan penduduk pada kelompok umur 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (penduduk yang berada pada interval umur 15-64 tahun). Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan (RK) atau *Dependency Ratio*.

Tabel 4.2. Rasio Ketergantungan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2003-2006

Jenis Kelamin	2003	2004	2005	2006
Laki-laki	64,6	64,6	62,5	62,2
Perempuan	58,6	55,2	57,9	57,4
Total	61,5	59,7	60,0	59,7

Sumber: Susenas 2003-2006 (BPS)

Pada tabel terlihat bahwa tahun 2006 angka ketergantungan laki-laki tetap lebih tinggi dari pada perempuan. Dibandingkan tahun 2005, pada tahun 2006 angka ketergantungan propinsi Sumatera Barat turun menjadi 59,7. Sedangkan pencapaian pendidikan penduduk Sumbar dapat dilihat di tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 10 tahun keatas Menurut Pendidikan Yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak pernah sekolah	27.92	30.11	29.05
Tamat SD	26.51	24.66	25.55
Tamat SMP	18.33	17.1	17.7
Tamat SMA	20.77	20.46	20.61
Akademi/Universitas	6.47	7.68	7.09

Sumber: Susenas Modul 2006

Kualitas penduduk suatu wilayah secara langsung bisa dilihat dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan rendah ataupun tidak pernah sekolah, maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut termasuk rendah. Dari segi penawaran, secara teoritis keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi merupakan implikasi terbatasnya daya tampung perguruan tinggi di Sumbar. Sementara itu, dari segi permintaan, pendapatan penduduk yang masih rendah menyebabkan keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi.

4.3. Disparitas Pendidikan di Sumbar

Ada dua disparitas yang akan dibahas dalam bagian ini. **Yang pertama** adalah disparitas pendidikan menurut tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Jika dibandingkan antara penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan, terlihat adanya ketimpangan pendidikan, dalam arti pendidikan penduduk perkotaan lebih baik dibandingkan pendidikan penduduk perdesaan.

Fakta menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan rendah, proporsi penduduk berpendidikan di perdesaan lebih besar dibandingkan proporsi di

perkotaan. Sedangkan, untuk tingkat pendidikan yang relatif tinggi, proporsi untuk perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan.

Disparitas kedua yang hendak dibahas adalah disparitas pendidikan menurut jenis kelamin. Bila dilihat dari data di Sumatera Barat tidak terjadi disparitas tersebut, malah sebaliknya.

Angka Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal seseorang. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Angka Partisipasi sekolah (APS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk khususnya anak usia sekolah dalam proses kegiatan pendidikan formal. Angka Partisipasi Sekolah adalah persentase penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tertentu tanpa melihat panjangnya pendidikan yang sedang diikuti (lihat word tingkat partisipasi pendidikan).

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2006

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan :				
Laki-Laki	98.69	93.46	77.54	28.72
Perempuan	98.32	96.49	76.73	35.48
L+P	98.52	94.97	77.14	32.2
Perdesaan :				
Laki-Laki	96.55	83.12	53.22	8.33
Perempuan	98.28	88.46	62.99	11.42
L+P	97.37	85.75	58.1	9.93
K+D :				
Laki-laki	97.2	86.13	61.17	16.01
Perempuan	98.29	90.83	67.43	20.42
L+P	97.71	88.45	64.29	18.29

Sumber: Susenas Modul 2006

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, karena ada kecenderungan bahwa laki-laki lebih banyak merantau ke luar daerah Sumbar dibandingkan perempuan.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk berumur 7 tahun keatas menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tdk/Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	1.08	97.71	1.21	100
13-15	0.58	88.45	10.97	100
16-18	0.27	64.29	35.44	100

Sumber: Susenas Modul 2006

Tabel ini menunjukkan bahwa dimulai kelompok usia 7-12 tahun persentase penduduk yang masih sekolah cenderung semakin menurun sejalan dengan meningkatnya kelompok umur.

Tabel 4.6. Angka Partisipasi Sekolah SMP, SMA dan PT per Kabupaten/Kota

Kab/Kota	SMP			SMA			PT		
	Total	LK	PR	Total	LK	PR	Total	LK	PR
Kab Kep. Mentawai	90.50	92.64	88.52	62.55	71.15	53.76	14.87	19.94	9.77
Kab Pessel	88.75	82.39	93.68	61.52	55.21	68.57	11.93	10.97	12.89
Kab Solok	84.95	80.32	89.46	57.42	54.48	60.73	13.53	10.33	17.25
Kab Swlto/Sijunjung	82.28	80.21	85.03	50.83	49.52	52.45	9.10	10.25	8.19
Kab Tanah Datar	87.36	82.36	93.63	66.94	62.18	72.08	11.85	7.83	15.90
Kab Padang Pariaman	89.90	88.74	90.85	60.97	42.92	72.47	16.74	13.40	19.25
Kab Agam	88.17	80.16	95.81	73.51	68.91	78.88	12.16	9.80	14.23
Kab Lima Puluh Kota	86.54	83.06	90.98	70.82	62.67	78.43	8.31	9.58	6.98
Kab Pasaman	84.31	77.36	90.61	55.68	47.48	65.30	7.32	6.64	7.99
Kab Solok Selatan	78.35	74.98	82.03	46.38	39.36	52.27	7.02	8.72	5.51
Kab Dharmas Raya	83.30	81.42	85.28	46.76	47.35	46.18	6.34	7.64	5.05
Kab Pasaman Barat	81.75	80.05	83.68	53.58	48.05	60.55	12.04	9.09	15.38
Kota Padang	96.01	97.72	94.22	83.77	85.41	81.93	44.43	39.72	48.10
Kota Solok	89.04	87.18	91.18	76.35	68.97	81.11	22.95	24.73	21.11
Kota Sawahlunto	88.43	89.69	87.04	64.27	56.77	72.55	5.15	4.57	5.70
Kota Padang Panjang	83.17	78.72	88.27	72.93	69.42	76.74	28.92	25.09	32.05
Kota Bukittinggi	93.91	95.56	92.86	71.22	67.65	74.65	24.75	16.67	34.04
Kota Payakumbuh	93.28	94.45	92.32	86.21	84.17	88.13	13.97	15.35	12.36
Kota Pariaman	89.70	88.95	90.48	64.19	54.38	75.43	19.74	20.52	19.11
Sumatera Barat	87.35	85.05	89.79	64.52	59.79	69.06	15.32	14.25	16.36

Sumber : Susenas Kor 2005, diolah sendiri

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. **Contoh** : APK SD merupakan

persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan (missal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun), daerah kota atau daerah perbatasan.

Tabel 4.7. Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD,SMP,SMA dan PT.

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	PT
<i>Perkotaan</i>				
Laki-Laki	107.92	88.96	85.29	30.53
Perempuan	108.92	96.52	80.36	40.46
L+P	108.09	92.71	82.85	35.65
<i>Perdesaan</i>				
Laki-laki	108.85	75.39	54.76	7.02
Perempuan	109.52	84.21	66.03	12.86
L+P	109.17	79.73	60.39	10.05
<i>K+D</i>				
Laki-laki	108.57	79.34	64.74	15.88
Perempuan	109.18	87.83	70.66	23.19
L+P	108.85	83.53	67.69	19.66

Sumber: Susenas Modul 2006

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan lebih kecil

dari 100 persen. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, Karena APK menyangkut anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Dari tabel terlihat bahwa APS di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk di daerah perkotaan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 4.8. Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP, SMA dan PT

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	PT
<i>Perkotaan</i>				
Laki-Laki	95.98	75.07	66.3	24.57
Perempuan	92.43	79.16	63.87	33.15
L+P	94.4	77.11	65.09	28.99
<i>Perdesaan</i>				
Laki-laki	93.9	60.85	40.41	3.18
Perempuan	94.28	67.07	48.16	7.91
L+P	94.08	63.91	44.28	5.63
<i>K+D</i>				
Laki-laki	94.53	64.99	48.88	11.24
Perempuan	93.76	70.63	53.24	17.35
L+P	94.17	67.77	51.05	14.40

Sumber: Susenas Modul 2006

Rata-rata Lama sekolah

Selain dari angka melek huruf, tingkat pendidikan penduduk dewasa juga dapat dilihat dari rata-rata lamanya(tahun) bersekolah. Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat tahun 2006 masih mencapai 8,0 tahun, masih sama dengan tahun 2002 dan 2005. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah nasional tahun 2006 sebesar 7,4 tahun, angka ini lebih kecil dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh DKI Jakarta sebesar 10,8 tahun. Dibandingkan dengan Propinsi di wilayah Sumatera, rata-rata lama sekolah SumBar berada di urutan kelima setelah SuMut(8,6 tahun), Nanggroe Aceh Darusalam (8,5 tahun), Riau (8,4 tahun) dan Kepulauan Riau (8,4 tahun).

Lambatnya perkembangan penduduk terutama Propinsi Sumatera Barat dibidang pendidikan ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat Sumatera Barat tentang pentingnya pendidikan formal. Selain itu juga upaya pemerintah dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan masih belum mendapat perhatian yang maksimal.

Jika dilihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2002 sampai 2006, rata-rata lama sekolah penduduk Propinsi Sumatera Barat bertahan pada angka 8,0 tahun. Hal ini berarti bahwa dibidang pendidikan propinsi Sumatera Barat tergolong lambat perkembangannya.

Untuk daerah Kabupaten/Kota, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun keatas, yang telah mencapai lebih dari 10 tahun adalah kota Padang sebesar 10,8 tahun,

Tabel 4.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002,2005 dan 2006

Lokasi	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
	2002	2005	2006
Kab Kep. Mentawai	5,8	6,5	6,5
Kab Pesisir Selatan	7,4	7,5	7,5
Kab Solok	6,8	7,3	7,3
Kab Swl / Sijunjung	6,3	7,1	7,2
Kab Tanah Datar	7,8	7,8	7,8
Kab Padang Pariaman	6,8	6,9	6,9
Kab Agam	7,8	8,1	8,2
Kab Lima Puluh Kota	7,3	7,3	7,3
Kab Pasaman	7,2	7,2	7,4
Kab Solok Selatan	-	7,2	7,4
Kab Dharmasraya	-	6,8	7,2
Kab Pasaman Barat	-	7,2	7,9
Kota Padang	10,8	10,8	10,8
Kota Solok	9,7	9,8	9,8
Kota Sawahlunto	8,5	8,6	8,6
Kota Padang Panjang	10,2	10,2	10,2
Kota Bukittinggi	10,2	10,0	10,1
Kota Payakumbuh	9,0	8,9	9,0
Kota Pariaman	-	8,7	9,3
<i>Propinsi</i>	8,0	8,0	8,0

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Sumbar 2006 (BPS)

Hal ini merefleksikan tingkat pendidikan penduduk dewasa di daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah kabupaten. Tingginya tingkat pendidikan di daerah perkotaan disebabkan karena sarana dan prasarana pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dibandingkan dengan perdesaan (kabupaten).

Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sumbar pada tahun 2005 berjumlah 482,81 ribu jiwa, yang berada di daerah perkotaan 189,28 ribu jiwa dan di daerah perdesaan 293,52 ribu jiwa.

Salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah dengan melihat seberapa besar porsi pengeluaran untuk konsumsi kelompok bukan makanan. Semakin besar porsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan dari pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga mencerminkan semakin baik tingkat kesejahterannya. Hal ini dapat dijelaskan dari pola pengeluaran untuk konsumsi makanan pada umumnya elastisitas permintaan terhadap konsumsi bukan makanan umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan dan atau di tabung (*saving*).

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan indikator tentang kualitas penduduk berusia dewasa dalam hal kemampuan baca tulis. Angka melek huruf dihitung dari persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel 4.10 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota

Lokasi	Angka melek huruf (%)	
	2002	2005
Kab Kep. Mentawai	90,8	92,2
Kab Pesisir Selatan	93,9	92,1
Kab Solok	95,8	97,1
Kab Swl / Sijunjung	87,3	88
Kab Tanah Datar	93,3	96,3
Kab Padang Pariaman	95,5	94,4
Kab Agam	97,5	96,4
Kab Lima Puluh Kota	94,4	98,1
Kab Pasaman	-	95,8
Kab Solok Selatan	-	94,4
Kab Dharmasraya	-	87,7
Kab Pasaman Barat	-	95,7
Kota Padang	98,2	99,5
Kota Solok	97,3	98,5
Kota Sawahlunto	96,6	97,1
Kota Padang Panjang	98,5	99,3
Kota Bukittinggi	98	98,9
Kota Payakumbuh	96,3	98,6
Kota Pariaman	-	96,6
<i>Propinsi</i>	95,1	96,0

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2006

Angka melek huruf di daerah kota secara umum lebih tinggi dari daerah kabupaten. Kota Padang dan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang mempunyai angka melek huruf tertinggi, yaitu 99,5 dan 99,3 artinya pada kedua kota tersebut hanya ada 0,5 dan 0,7 % penduduk usia 15 tahun yang buta huruf. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Determinan Bersekolah Model Probit

Pada bab ini akan diuraikan hasil regresi *Probit* dari kedua model yang telah disebutkan dalam metode penelitian.

5.1.1. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Tabel 5.1. Hasil Probit untuk Jenjang Pendidikan SMP

Variabel	dF/dx	Std. Err.	z
jenis kelamin*	-0.041610	0.012253	-3.39
Tahun bersekolah bapak*	0.003813	0.001029	3.68
Tahun bersekolah ibu*	0.005120	0.001071	4.76
Ibu Bekerja	-0.023525	0.013689	-1.77
Sektor Pekerjaan Bapak*	-0.036645	0.018095	-2.07
Jenis Kelamin KRT	-0.165837	0.183331	-1.20
Status Pekerjaan Bapak	0.011210	0.015211	0.72
Jenis Pekerjaan Utama Bapak	0.014214	0.017006	0.85
Pendapatan Per Kapita	-0.004806	0.018825	-0.26
Kepemilikan Rumah	-0.002228	0.015285	-0.15
Area	-0.027568	0.020793	-1.36
Highly Dependency Ratio	0.010984	0.022647	0.48
Kemiskinan*	-0.068636	0.024755	-3.13
Biaya Pendidikan	-0.013765	0.008552	-1.61
Jumlah SMP	-0.001138	0.002107	-0.54
Jarak ke SMP terdekat	-0.000281	0.000780	-0.36
Jenis Jalan	-0.004126	0.017008	-0.24
Penghasilan Utama Penduduk	0.003526	0.007863	0.45
Number of Observasi	2,203		
Pseudo R ²	0.1032		
LR Chi ²	160.39		

Sumber: Data Susenas Kor 2005 dan PoDes 2006

*) Signifikansi pada $\alpha = 0,05$.

Secara umum model menunjukkan tingkat signifikansi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pengujian signifikansi variabel penjelas secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel terikat (*dependent*). Pengujian hipotesis nol global bahwa semua koefisien variabel penjelas sama dengan nol ditolak secara signifikan bahkan pada level signifikan 5 %. Sebelum interpretasi lebih jauh, variabel terikat yang digunakan dalam model ini bernilai 1 adalah status bersekolah anak. Dalam interpretasi variabel terikatnya adalah probabilitas partisipasi bersekolah anak jenjang SMP.

Dilihat dari signifikansi setiap variabel penjelas dalam menjelaskan variabel terikat, jenis kelamin kepala rumah tangga, jenis pekerjaan utama bapak, pendapatan rumah tangga, kepemilikan rumah, area, depratio, jumlah SMP, jarak SMP, jenis jalan dan penghasilan utama penduduk tidak signifikan dalam menjelaskan variabel terikat pada level signifikan 5%. Artinya, bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap probabilitas anak untuk bersekolah.

Disparitas pendidikan antar daerah tidak terlihat, karena variabel area tidak signifikan, artinya probabilitas anak bersekolah SMP tidak berpengaruh terhadap daerah tempat tinggalnya. Dengan kata lain, probabilitas anak bersekolah SMP di daerah perkotaan dengan di daerah pedesaan tidak berbeda jauh. Hal ini disebabkan, setiap kabupaten bahkan sampai level kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana sekolah sampai tingkat SMP yang merupakan implementasi dari program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah.

Jenis kelamin kepala rumah tangga tidak berdampak secara signifikan terhadap partisipasi anak sekolah SD dan SMP. Salah satunya disebabkan oleh, budaya dan kebiasaan masyarakat Sumbar (Minangkabau) selain bapak, paman (kakak atau adik laki-laki ibu) turut bertanggung jawab atas masa depan keponakannya. Selain itu, program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah juga dapat sebagai faktor penyebab dan juga rata-rata lamanya bersekolah di Sumbar adalah 8 tahun (setingkat SMP). Sehingga meskipun jenis kelamin kepala rumah

tangga perempuan (janda), namun partisipasi sekolah sampai tingkat SMP masih tinggi.

Daerah tempat tinggal perkotaan dan pedesaan dilihat secara menyeluruh mempunyai arti luas yang dicirikan dengan perbedaan yang cukup besar dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya, baik menyangkut tingkatan kondisi ekonomi, ketersediaan fasilitas sosial, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta kemudahan-kemudahan hidup lainnya. Oleh karena itu, secara umum penduduk perkotaan mempunyai berbagai kelebihan dibanding penduduk desa.

Status pekerjaan bapak (formal/informal) dan jenis pekerjaan bapak tidak sesuai dengan hipotesa awal yaitu apabila bapak bekerja di kegiatan formal maka partisipasi anak bersekolah lebih tinggi dibandingkan dengan bapak yang bekerja di kegiatan informal. Hal ini disebabkan karena mayoritas status pekerjaan bapak di Sumbar adalah informal (petani, pedagang, buruh dll).

Probabilitas anak laki-laki untuk bersekolah 4,16% lebih kecil dibandingkan dengan probabilitas bersekolah anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki di Sumbar dari usia dini sudah memulai merantau dan bekerja di sektor informal seperti berdagang, bertani dsb. Sehingga variabel jenis kelamin laki-laki yang diekspektasikan berpengaruh positif terhadap probabilitas bersekolah ternyata berpengaruh negatif terhadap probabilitas bersekolah.

Karakteristik pendidikan orang tua terlihat memegang peranan besar dalam keputusan bersekolah anak di SMP. Probabilitas bersekolah anak yang mempunyai bapak yang berpendidikan tinggi 0,38 % lebih besar dari pada anak yang mempunyai bapak yang berpendidikan rendah. Sedangkan probabilitas bersekolah anak yang mempunyai ibu yang berpendidikan tinggi 0,51% lebih besar dari pada anak yang mempunyai ibu yang berpendidikan rendah. Hal ini bisa dimengerti karena biasanya orang tua memiliki keinginan agar anaknya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Namun demikian, pendidikan ibu lebih berpengaruh terhadap partisipasi bersekolah anak dari pada pendidikan bapak. Karena peran ibu di Sumbar dalam mendidik anak lebih dominan dari peran bapak.

Keluarga miskin berpengaruh negatif terhadap probabilitas anak untuk bersekolah. Anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki kecenderungan untuk tidak bersekolah sebesar 6,23% dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga tidak miskin. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan SMERU (2006) bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga yang rendah menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah anak SMP. Rumah tangga miskin biasanya lebih rentan dalam menghadapi krisis sehingga biasanya anak ikut bekerja membantu orang tua.

Variabel pendapatan rumah tangga yang merupakan *proxy* dari variabel *expenditure* tidak berpengaruh secara signifikan dengan probabilitas bersekolah, artinya variabel pendapatan tidak dapat menjelaskan secara tepat hubungannya dengan bersekolah anak di Sumatera Barat. Kemungkinan bahwa korelasi antara variabel pendapatan dengan partisipasi sekolah sudah ditangkap oleh variabel lainnya (misalnya variabel kemiskinan).

Sektor pekerjaan bapak berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah anak. Bapak yang bekerja di sektor pertanian akan menurunkan partisipasi sekolah anak sebesar 3,66%, jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan, sebagian besar bapak yang bekerja di sektor pertanian tinggal di daerah pedesaan dan berpendidikan rendah.

5.1.2 Jenjang Sekolah Menengah Atas

Untuk analisa ini dapat dilihat tabel 5.2. Nilai Likelihood Ratio= 257,75 (P=0.0000). Artinya model probit mampu menerangkan hubungan variabel terikat dengan variabel-variabel bebasnya.

Tabel 5.2 Hasil Probit untuk Jenjang Pendidikan SMA

Variabel	dF/dx	Std. Err.	z
jenis kelamin*	-0.097963	0.019719	-4.94
Tahun bersekolah bapak*	0.006107	0.001647	3.71
Tahun bersekolah ibu*	0.009354	0.001695	5.52
Ibu Bekerja*	-0.076297	0.021116	-3.61
Sektor Pekerjaan Bapak*	-0.109173	0.028802	-3.83
Jenis Kelamin KRT*	0.272404	0.040658	2.60
Status Pekerjaan Bapak	-0.030939	0.025786	-1.21
Jenis Pekerjaan Utama Bapak	-0.014022	0.026510	-0.53
Pendapatan Per Kapita	-0.000332	0.027667	-0.01
Kepemilikan Rumah	0.018987	0.025223	0.76
Area*	0.062422	0.029401	2.10
Highly Dependency Ratio	-0.098300	0.059682	-1.65
Kemiskinan*	-0.075565	0.034517	-2.25
Biaya Pendidikan*	0.027065	0.013233	2.04
Jumlah SMA	0.001196	0.003482	0.34
Jarak ke SMA terdekat	0.000112	0.000821	0.14
Jenis Jalan*	-0.061015	0.027717	-2.20
Penghasilan Utama Penduduk*	-0.031618	0.013003	-2.43
Number of Observasi	2,321		
Pseudo R ²	0.0885		
LR Chi ²	257.75		

Sumber: Susenas 2005 dan PoDes 2006

*) Signifikansi pada $\alpha = 0,05$.

Variabel yang signifikan adalah jenis kelamin, lamanya tahun sekolah bapak, lamanya tahun sekolah ibu, ibu bekerja, sektor pekerjaan bapak, jenis kelamin KRT, area, miskin, jenis jalan dan penghasilan utama penduduk.

Probabilitas anak laki-laki bersekolah SMA lebih rendah 9,79 % daripada probabilitas anak perempuan. Dari hasil ini, ada temuan menarik bahwa tidak terdapat disparitas gender bersekolah di Sumatera Barat, berlawanan dengan hipotesis tesis ini dan penelitian terdahulu dari Li & Tsang(2002) yang mengatakan bahwa gender menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan bersekolah anak.

Sama dengan penelitian SMP, pendidikan orang tua (bapak dan ibu berpengaruh signifikan terhadap probabilitas anak untuk bersekolah. Pendidikan

Universitas Indonesia

ibu lebih berpengaruh daripada pendidikan bapak. Karakteristik pendidikan orang tua terlihat memegang peranan besar dalam keputusan bersekolah anak di SMA. Probabilitas bersekolah anak yang mempunyai bapak yang berpendidikan tinggi 0,62 % lebih besar dari pada anak yang mempunyai bapak yang berpendidikan rendah. Sedangkan probabilitas bersekolah anak yang mempunyai ibu yang berpendidikan tinggi 0,93% lebih besar dari pada anak yang mempunyai ibu yang berpendidikan rendah. Hal ini bisa dimengerti karena biasanya orang tua memiliki keinginan agar anaknya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Namun demikian, pendidikan ibu lebih berpengaruh terhadap partisipasi bersekolah anak dari pada pendidikan bapak. Karena peran ibu di Sumbar dalam mendidik anak lebih dominan dari peran bapak.

Ibu yang bekerja berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah anak, berlawanan dengan hipotesa yang dibuat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian di tabel 5.2, persentase partisipasi anak bersekolah lebih rendah sebesar 7,63% bila dibandingkan dengan partisipasi anak bersekolah jika ibu yang tidak bekerja. Karena sebagian besar ibu yang bekerja disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah (miskin) sehingga dengan bekerja mereka menambah penghasilan.

Kemudian daerah tempat tinggal juga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah, karena penduduk perkotaan lebih banyak bersekolah SMA sebesar 6,24% dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah juga masih relatif rendah yang ditandai dengan adanya selisih APK antara sasaran tahun 2009 (69,34%) dengan capaian terakhir pada tahun 2007 (60,51%). Fasilitas layanan pendidikan menengah yang belum merata merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini, sehingga untuk bersekolah mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapai ke sekolah SMA terdekat.

Angka dependensi ratio juga tidak berpengaruh terhadap partisipasi sekolah. Rasio ketergantungan tidak mampu menjelaskan hubungannya dengan partisipasi sekolah. Hasil ini berlawanan dengan hipotesa awal. Menurut Elfindri (2006)

bahwa rumah tangga yang besar jumlahnya cenderung meningkatkan *labour input* untuk kegiatan-kegiatan produksi, misalnya untuk masyarakat pedesaan dan nelayan. Jika hal itu terjadi pada masyarakat perkotaan, maka kecenderungan demikian mungkin tidak berlaku. Ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi angka dependensi ratio berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang berusia antara 0-14 tahun dan usia diatas 65 tahun, mengakibatkan semakin banyak beban tanggungan rumah tangga tersebut. Akibatnya, partisipasi sekolah anak pun akan menurun.

Status jenis kelamin kepala rumah tangga apakah seorang laki-laki ataupun perempuan menunjukkan hubungan positif terhadap partisipasi sekolah. Artinya, rumah tangga yang dikepalai oleh seorang laki-laki menghadapi resiko bersekolah lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan.

Dari segi suplai pendidikan, didapatkan hanya jenis jalan yang signifikan. Jenis jalan berpengaruh negatif terhadap probabilitas bersekolah, sesuai dengan hipotesa tesis ini. Semakin baik infrastruktur jalan suatu wilayah, maka akses daerah tersebut akan mudah, akibatnya mobilitas penduduk juga berjalan lancar. Daerah yang jenis perkerasan jalannya aspal /beton meningkatkan probabilitas sekolah SMA lebih besar 6.10 % dibandingkan jenis perkerasan jalannya bukan aspal/beton.

Sedangkan jumlah SMA tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas sekolah anak di Sumbar. Hal ini bukan berarti bahwa jumlah SMA di Sumbar cukup memadai untuk menampung anak usia 16-18 tahun untuk bersekolah. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa hasil output ini. Studi lapangan bisa dilakukan untuk mendeteksi wilayah mana di Sumatera Barat yang masih belum memadai sarana dan prasarana sekolahnya. Dari segi tipologi wilayah di Sumatera Barat yang tidak seragam, sehingga ada daerah tertentu yang mempunyai kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan.

Variabel penghasilan utama penduduk berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah anak SMA. Penduduk yang penghasilan utamanya dari sektor pertanian, sebagian besar miskin. Akibatnya, anak usia 16-18 tahun sudah banyak

dituntut untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga cukup banyak dari mereka yang memilih bekerja di bandingkan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

